

Pelaksanaan Diklat Teknis Berbasis E-Learning dalam rangka Pengembangan Kompetensi ASN pada Badan Diklat Provinsi Gorontalo

IRFAN IBRAHIM

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo
Jln. HB. Jassin Kompleks MAN Insan Cendekia Gorontalo
E-mail : irfanibrgorontalo@gmail.com

Abstract: There is a need for the Gorontalo Provincial Government for professional apparatus resources, encouraging the implementation of comprehensive ASN competency development. If this need is not met, it will have an impact on ineffective and inefficient local government administration so that it has implications for the low quality of service to the community. The development of ASN competencies to meet 20 JP (Lesson Hours) for each ASN is estimated to cost a budget of Rp. 38,142,000,000. This number comes from the number of ASN Gorontalo Provincial Government as many as 5,868 people multiplied by the technical education and training index (average estimate of Rp. 6,500,000 per participant for 20 JP). Not including the obligation for structural training of Rp. 23,880,000,000 for 796 structural officials (the average education and training index is Rp. 30,000,000 per participant). However, the budget availability for ASN competency development at the Gorontalo Provincial Education and Training Agency in 2019 is only Rp. 4,606,239,035, even for the 2020 budget, there was a decrease of only Rp. 1,335,768,521. Inequality in the availability of this budget will cause the implementation of ASN competency development at the Gorontalo Provincial Education and Training Agency will not be achieved as expected. Therefore, based on this problem, the Gorontalo Provincial Education and Training Agency is looking for a solution by developing low-cost education and training so that it will reduce budget dependence. The results of the implementation of e-learning-based technical training have succeeded in reducing the budget needs of the Education and Training Agency by more than 50%.

Keywords: *Competency Development, e-Learning Training, Budget Efficiency*

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 telah mengamanatkan pencapaian visi reformasi birokrasi Indonesia yakni “*Terwujudnya pemerintahan kelas dunia*”, maka dalam rangka pencapaian visi tersebut diperlukan peran ASN dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan global. Peran ASN ini sangat penting mengingat untuk mencapai birokrasi berkelas dunia diperlukan ASN berkelas dunia yang mampu memberikan pelayanan publik kelas satu.

Akan tetapi dengan memperhatikan kondisi ASN saat ini, kita akan dihadapkan dengan fakta bahwa sebagian besar budaya ASN di Indonesia masih jauh dari budaya ASN yang berkelas dunia. Budaya ASN berkelas dunia yang dicirikan dengan ASN peduli, inovatif,

kolaboratif, dan transparan ternyata berbeda dengan budaya ASN saat ini yang cenderung *careless, business as usual, silo mentality*, dan tidak transparan.

Kondisi ini kemudian direspons oleh pemerintah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah wajib menyusun pengembangan kompetensi ASN dalam rangka perubahan budaya ASN menjadi ASN berkelas dunia. Dalam melakukan pengembangan kompetensi ASN dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni dengan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) maupun non Diklat, dimana selama ini Diklat dipandang sebagai alat untuk meningkatkan kompetensi ASN dan merupakan bagian integral bagi pengembangan ASN itu sendiri.

Untuk mewujudkan idealisme nasional dimaksud berbagai upaya dilakukan oleh Badan Diklat Provinsi

Gorontalo, antara lain dengan perencanaan pengembangan kompetensi aparatur yang dituangkan melalui Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo berisi tentang arah masa depan organisasi disertai dengan strategi dan kebijakan, program, serta kegiatan pokok, yang akan menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana pengembangan kompetensi ASN Provinsi Gorontalo setiap tahunnya, sekaligus menjadi tolok ukur capaian kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo sebagaimana tugas dan fungsi yang melekat didalamnya adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 78 Tahun 2016 Pasal 3 disebutkan bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Provinsi Gorontalo di bidang pendidikan dan pelatihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Provinsi Gorontalo yang baru dibentuk pada tahun 2016 dihadapkan oleh kondisi-kondisi sebagai berikut:

- Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) pengelolannya belum terpusat di Badan Diklat Provinsi Gorontalo. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki anggaran pengembangan SDM aparatur sendiri. Di tahun 2019 yang sedang berjalan ini, terdata sejumlah Rp. 36,053 Milyar anggaran pengembangan kompetensi ASN di seluruh OPD, hal ini sangat berbeda dibandingkan dengan pagu anggaran pada Badan Diklat

Provinsi Gorontalo yang hanya mencapai Rp. 4,6 milyar di tahun yang sama.

- Selain dilihat dari alokasi anggaran, pengembangan kompetensi ASN oleh Badan Diklat Provinsi Gorontalo hanya terfokus pada diklat-diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan, serta cenderung mengabaikan Diklat Teknis dan Fungsional.

Berdasarkan kondisi-kondisi yang dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan yang menjadi tanggung jawab Badan Diklat Provinsi Gorontalo, antara lain sebagai berikut:

- Kurangnya anggaran pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Gorontalo.
- Kurangnya jumlah pelaksanaan diklat teknis.

Permasalahan-permasalahan yang diuraikan di atas jika tidak segera diselesaikan maka akan berdampak pada kinerja Badan Diklat Provinsi Gorontalo terutama kinerjanya dalam pengembangan kompetensi ASN antara lain dampaknya adalah:

1. Tidak terpenuhinya pemenuhan hak PNS untuk pengembangan kompetensi sebesar 20 Jam Pembelajaran (JP)
2. Semakin rendahnya kualitas ASN, terutama menghadapi tantangan Era Revolusi 4.0
3. Profesionalitas ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu.

Memperhatikan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan di atas, maka diperlukan sebuah solusi maupun strategi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan strategi pelaksanaan diklat teknis berbasis e-learning bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Kondisi yang diharapkan dengan penerapan strategi ini antara lain:

- Tercapainya pengembangan kompetensi ASN melalui pelaksanaan diklat teknis berbasis e-learning.

- Terpenuhinya pengembangan kompetensi SDM Aparatur, terutama untuk memenuhi hak ASN 20 JP pengembangan kompetensi.

Oleh karena itu, guna pencapaian kondisi yang diharapkan di atas, terutama untuk memenuhi kewajiban 20 JP pengembangan kompetensi ASN Provinsi Gorontalo, maka strategi yang diangkat adalah “Pelaksanaan Diklat Teknis Berbasis e-learning dalam rangka Pengembangan Kompetensi ASN pada Badan Diklat Provinsi Gorontalo” sebagai judul dari tulisan ini.

METODE

Metode pada penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mengungkap dan memahami fenomena yang terjadi, yang pada akhirnya memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai permasalahan yang terjadi serta solusi yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi Gorontalo. Adapun untuk metode yang digunakan dalam pelaksanaan Diklat Teknis Berbasis e-Learning ini terdiri dari lima tahap, yaitu:

1. Perancangan sistem e-learning.
Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah: Menentukan diklat teknis yang akan dilaksanakan secara e-learning; Membentuk tim perancang sistem; Mengumpulkan bahan dan data; dan Membuat desain awal/prototype sistem.
2. Pembuatan aplikasi sistem e-learning.
Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah: Membentuk Tim kerja; Melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Diklat Teknis dan Fungsional; Pembuatan sistem pembelajaran e-learning; dan Validasi sistem e-learning oleh Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo.
3. Ujicoba aplikasi sistem diklat teknis berbasis e-learning.
Pada tahap ini, kegiatan yang dilaksanakan adalah: Membentuk panitia penyelenggara; Melakukan sosialisai tentang rencana pelaksanaan diklat berbasis e-learning; Melaksanakan

ujicoba; Memperbaiki sistem e-learning; Validasi ulang sistem e-learning oleh Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo; dan Membuat pedoman teknis diklat.

4. Implementasi diklat teknis berbasis e-learning.

Pada tahap ini, kegiatan yang dilaksanakan adalah: Melaksanakan rapat kesiapan pelaksanaan; Mengirim surat pemanggilan peserta mengikuti diklat; dan Melaksanakan diklat teknis berbasis e-learning.

5. Monitoring dan evaluasi.

Pada tahap ini, kegiatan yang dilaksanakan adalah: Melakukan evaluasi penyelenggaraan; dan Membuat laporan kegiatan.

HASIL

Hasil pelaksanaan Diklat Teknis berbasis e-learning ini berbentuk pelaksanaan *pilot project* yang diimplementasikan pada Diklat Teknis Keprotokolan. Diklat Teknis Keprotokolan Berbasis e-Learning dilaksanakan pada tanggal 18 sd 25 Februari 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 41 peserta berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Adapun output diklat teknis keprotokolan berbasis e-learning ini, dirinci sebagai berikut:

- 1) Peserta yang lulus sebanyak 16 orang dan diberikan Sertifikat Kelulusan Pelatihan. Peserta yang lulus ini diwajibkan melaksanakan implementasi materi keprotokolan pada kegiatan-kegiatan keprotokolan di lingkungan instansinya dan diberikan waktu selama 6 bulan untuk proses implementasi tersebut. Tambahan kewajiban bagi peserta ini dilaksanakan mengingat pelaksanaan diklat dilakukan secara daring, sehingga perlu dilaksanakan evaluasi pasca diklat yang bertujuan memantau implementasi praktek mandiri dari setiap peserta.

- 2) Peserta yang tidak lulus sebanyak 25 orang dan diberikan sertifikat mengikuti pelatihan Diklat Teknis Keprotokolan Berbasis e-Learning. Peserta yang tidak lulus ini, tidak melaksanakan praktek mandiri seperti pada poin (1) di atas, namun masih diberikan kesempatan mengikuti kembali diklat yang sama.

PEMBAHASAN

Kondisi Lingkungan Strategis di Era Global.

Kondisi lingkungan strategis ini diidentifikasi melalui isu-isu aktual dan strategis di era global berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Badan Diklat Provinsi Gorontalo antara lain diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Rendahnya Kemampuan Daya Saing Bangsa. Konteks kondisi kekinian menggambarkan kemampuan bangsa-bangsa dalam menghadapi tantangan dalam berbagai dimensi kehidupan. Semakin tinggi kemampuan daya saing suatu bangsa, semakin unggul bangsa tersebut dalam menghadapi persaingan dengan bangsa lain di era global. Saat ini data daya saing pemerintah Indonesia menempati urutan 36 dari sebelumnya urutan 41, berdasarkan data *The Global Competitiveness Report 2017-2018* dari *World Economic Forum*. Hal ini menjadi tantangan bagi Badan Diklat Provinsi Gorontalo untuk berkontribusi meningkatkan kemampuan daya saing bangsa melalui pengembangan kompetensi SDM ASN di Provinsi Gorontalo.
- 2) Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Rendahnya kualitas SDM dari ASN saat ini berkontribusi terhadap kualitas

pelayanan publik yang diberikannya. Pelayanan publik di Indonesia baik pusat maupun daerah termasuk di Provinsi Gorontalo saat ini masih jauh dari ekspektasi masyarakat. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi Badan Diklat Provinsi Gorontalo dalam peningkatan kompetensi ASN guna peningkatan pelayanan publik.

- 3) Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi telah menjadi agenda pemerintah dalam mengakselerasi ketercapaian visi pembangunan nasional. Visi reformasi birokrasi yakni terwujudnya pemerintahan kelas dunia, menuntut ASN yang profesional, responsif, adaptif, dan mengubah paradigma sebagai pelayan publik dan agen perubahan. Akan tetapi budaya ASN di Indonesia masih jauh dari budaya ASN berkelas dunia yang cenderung careless, business as usual, silo mentality, dan tidak transparan. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi ASN di Provinsi Gorontalo dimana hal ini merupakan tantangan bagi Badan Diklat Provinsi Gorontalo dalam melakukan upaya sistematis untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional, bersih, kompeten, dan melayani.

Kondisi Pengembangan Kompetensi di Pemerintah Provinsi Gorontalo.

- 1) Pengembangan kompetensi ASN untuk memenuhi 20 JP diperkirakan akan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 38.142.000.000. Jumlah ini berasal dari jumlah ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo sebanyak 5.868 orang dikalikan dengan indeks diklat teknis (Perkiraan rata-rata Rp. 6.500.000 perpeserta untuk 20 JP). Belum termasuk kewajiban diklat struktural sebesar Rp. 23.880.000.000 untuk 796 Pejabat struktural (indeks diklatpim rata-rata Rp. 30.000.000 per peserta)
- 2) Anggaran untuk pengembangan

kompetensi ASN di Badan Diklat Provinsi Gorontalo Tahun 2018 hanya sebesar Rp. 4.606.239.035, bahkan untuk anggaran tahun 2019 malah terjadi penurunan tinggal sebesar Rp. 1.335.768.521.

- 3) Pola pengembangan kompetensi masih terkotak-kotak pada masing-masing instansi (OPD) sehingga berpengaruh terhadap pola pikir egosektoral. Hal ini terlihat dari masing-masing OPD menyiapkan sendiri anggaran diklat teknis yang total dari seluruh OPD mencapai Rp. 36.053.000.000.

Identifikasi Analisis Situasi

Hasil identifikasi analisis situasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya Kebutuhan Pemerintah Provinsi Gorontalo akan SDM Aparat yang profesional dan berkelas dunia guna tercapainya tujuan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi maka akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak efektif dan tidak efisien sehingga misi yang lebih baik dan melayani tidak akan tercapai.
2. Sumber Daya Kediklatan yang terbatas berimplikasi pada rendahnya kualitas pelayanan kediklatan.
3. Diklat belum bisa memberikan jaminan terhadap pengembangan karir lulusan diklat sehingga diklat kurang diminati oleh PNS. Hal ini selain disebabkan oleh keterkaitan yang kurang jelas antara diklat dengan sistem dan pola karier PNS, juga disebabkan oleh upaya peningkatan SDM Aparatur yang dilakukan Badan Diklat baru sampai pada membekali kompetensi aparatur tanpa jaminan atas profesionalismenya.
4. Diklat belum dipandang sebagai kebutuhan yang dapat membekali PNS dalam menjawab berbagai dinamika permasalahan masyarakat, Perubahan Regulasi, perkembangan TIK dan tuntutan global. Sehingga, Program-

program yang terkait dengan pengembangan SDM aparatur pemerintah melalui diklat belum masuk sebagai program prioritas, hanya sebatas sebagai program penunjang.

5. Telah terjadi perubahan-perubahan kebijakan dalam pengembangan kompetensi ASN seperti adanya kewajiban pemenuhan hak pengembangan ASN sebesar 20 JP perorang pertahun, kebijakan sertifikasi kompetensi, dan kebijakan Diklatpim Pola Baru membutuhkan dukungan dana yang sangat besar, sementara anggaran pemerintah daerah masih terbatas.

Rekomendasi Penyelesaian

Berdasarkan hasil analisis SWOT, maka ditetapkan rencana strategis adalah dengan meningkatkan penyelenggaraan diklat-diklat non klasikal (non tatap muka). Agar rencana strategi ini dapat diimplementasikan, maka perlu dilakukan penjabaran strategi kedalam program peningkatan jumlah penyelenggaraan diklat-diklat non klasikal, yang bermuara pada kegiatan-kegiatan penting untuk dilakukan mengingat dalam rangka pemenuhan 20 JP pengembangan kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini dihadapkan oleh masalah kurangnya anggaran pengembangan kompetensi ASN. Oleh karena itu, penyelenggaraan diklat non klasikal dapat ditempuh dengan 3 (tiga) alternatif kegiatan yakni: melaksanakan diklat teknis secara e-learning, melaksanakan coaching dan mentoring, dan melaksanakan program magang. Berdasarkan metode ranking USG (*Urgensi, Seriousness, Growth*) maka dapat ditentukan satu kegiatan terpilih dalam rangka mengatasi persoalan keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi ASN yakni dengan melaksanakan diklat teknis secara *e-learning*.

SIMPULAN

Simpulan yang diperoleh dari diselenggarakannya Pelaksanaan Diklat Teknis Berbasis e-Learning adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi ASN di Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong upaya kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi ASN dalam bentuk diklat yang berbiaya rendah. Untuk mewujudkan inovasi dalam penyelenggaraan diklat berbiaya rendah maka kegiatan Pelaksanaan Diklat Teknis Berbasis e-Learning dapat menjadi pilihan bagi Badan Diklat Provinsi Gorontalo dalam rangka pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Gorontalo.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mensyaratkan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak pengembangan kompetensi sebesar 20 JP per PNS per tahun. Untuk mewujudkan pencapaian pemenuhan hak 20 JP pengembangan kompetensi ASN di Pemerintah Provinsi Gorontalo maka kegiatan Pelaksanaan Diklat Teknis Berbasis e-Learning dapat diimplementasikan sebagai alternative bagi pengembangan kompetensi ASN.
3. Strategi yang dapat ditempuh oleh Badan Diklat Provinsi Gorontalo dalam rangka pemenuhan hak 20 JP pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Gorontalo adalah dengan meningkatkan penyelenggaraan diklat-diklat non klasikal. Untuk itu Badan Diklat Provinsi Gorontalo dapat mempertimbangkan kegiatan pelaksanaan Diklat Teknis berbasis e-Learning dalam rangka implementasi strategi dari pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Gorontalo

DAFTAR RUJUKAN

Dewi, Sarinah. Dkk, *Pengembangan Kompetensi ASN*. 2018, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara.

Purwastuti, *Teknik Perkonsultansian Pelatihan*, 2016, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara.

Ratna, Sri., *Perancangan Sistem Diklat*, 2016, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara.

Winarty, Army. Dan Faihah, Iih. *Kebijakan Pembinaan Widyaiswara dan Angka Kreditnya*, 2016, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Internet:

Data ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo, <https://simpeg.gorontaloprov.go.id/rekap>

Daya Saing Negara, <https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018>

Analisis situasi, <https://fakhrurrojihan.wordpress.com/2015/06/12/analisa-situasi-dalam-pemecahan-masalah-dan-pengambilan-keputusan/>

Peraturan/Kebijakan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sekretariat Negara.

Peraturan Kepala LAN No.2 Tahun 2016 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Diklatpim tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Prajabatan CPNS Golongan III, Golongan I dan II, serta Prajabatan CPNS yang diangkat

dari tenaga Honorer Kategori 1 dan Kategori 2.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo.

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Gorontalo

Rencana Strategis Badan Diklat Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022.